

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Kesiapan Parpol Peserta Pemilu Menjelang Pendaftaran DCS

Pengantar diskusi oleh:

1. **Hadar N. Gumay** (Wakil Ketua KPU RI)
2. **Didik Supriyanto** (Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi /Perludem)
3. **M. Hanif Dhakiri** (Sekretaris Fraksi PKB dan Anoggtg Komisi X DPR RI)
4. **M. Yasin Ardhi** (Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang)

Moderator : Jaleswari Pramodhawardani, Anggota Dewan Penasehat TII

Partisipan

Peserta yang hadir +/- 33 orang. Peserta dari berbagai kalangan. Dari kalangan *civil society* antara lain dari GAPRI, PBHI, IFES, CNRS, FORMAPPI, JPIC MSC, CDI, WRI, dan lain sebagainya. Dari media ada Republika, RCTI, Media Indonesia, Tribun Rakyat, Koran Jakarta, Viva news.com, jawa pos dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Didik Supriyanto (Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi /Perludem)

Menjelang pencalonan ada tiga ironi di partai politik kita. *Pertama*, hampir semua parpol kita mengumumkan pembukaan penerimaan calon anggota legislative. Berita bukan hanya di Koran, di televisi, bahkan juga di Twitter dan Facebook. Ini ada positifnya dan tapi ada ironinya bahwa partai harusnya tak perlu cari caleg bisa mereka ambil dari kader-kader terbaik mereka. Hal ini juga berdasarkan UU Parpol bahwa mereka harus melakukan kaderisasi dan juga mereka menerima anggaran dari Negara. Timbul pertanyaan kemudian, bagaimana proses kaderisasi itu dijalankan.

kedua, semua partai politik mengambil kebijakan: semua anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dipersilakan mencalonkan kembali di daerah pemilihannya masing-masing pada Pemilu 2014. Ini menjadi ironi, karena banyak saat ini anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi tersangka maupun yang tersangkut korupsi.

Ketiga, sebagian partai politik mengeluhkan dan bahkan memprotes ketentuan KPU yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% calon perempuan di setiap daerah pemilihan; dan jika tidak terpenuhi, maka partai politik tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan tersebut. Tentu saja sikap itu seakan mengabaikan fakta historis bahwa kebijakan afirmasi buat calon perempuan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004 melalui UU No. 12/2003 dan diperkuat lagi menjelang Pemilu 2009 melalui UU No. 10/2008. Jika kebijakan afirmasi ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun, lalu kemana saja selama ini partai politik dalam mengurus kader-kader perempuan? Bukankah sejak Pemilu 2004 mereka berkomitmen untuk meningkatkan jumlah calon perempuan? Bukankah mereka sudah berjanji untuk merekrut lebih banyak lagi kader-kader perempuan? Mengapa kini masih mengeluhkan sulitnya memenuhi kuota 30% calon perempuan?

Di balik ironi pencalonan anggota legislatif oleh partai politik tersebut, sebetulnya terdapat jiwa pragmatisme partai politik dalam menghadapi pemilu. Selain lenyapnya ideologi dan pengabaian platform politik, pragmatisme juga disuburkan oleh penggunaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Karena tujuan partai politik dalam pemilu adalah mendapatkan kursi, maka dalam sistem pemilu ini, partai politik menggunakan logika sederhana: mencalonkan siapa saja yang berpotensi mendapatkan kursi, atau setidaknya-tidaknya dapat menambah perolehan suara guna mendapatkan kursi.

Lalu siapa calon yang berpotensi meraih kursi/suara tersebut? Pertama, adalah orang yang popularitasnya tinggi. Mereka yang populer tidak hanya artis yang sering mejeng di televisi, tetapi bisa juga istri/anak/adik/orangtua puncak pejabat eksekutif maupun eksekutif, nasional maupun lokal.

Kedua, adalah orang yang punya uang banyak, karena dengan uang banyak mereka bisa meningkatkan popularitas secara instan, juga bisa membeli suara. Inilah yang menyebabkan kader partai miskin dan aktivis sosial yang baru menjadi calon akan tidak berdaya menghadapi kompetisi perebutan nomor calon di internal partai dan perebutan suara pada hari pemilihan.

M. Yasin Ardhi (Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang)

Dari PBB kami sudah menyelenggarakan lokakarya pengkaderan Bulan Bintang dan melahirkan buku pedoman pengkaderan PBB. Ada istilahnya kemudian pengkaderan formal dan informal. Ada latihan dasar 1, latihan dasar 2 dan kursus nasional. Walau pun baru lahir 2008, pola pengkaderan ini telah berjalan.

Ketika ada ironi soal partai yang mengumumkan pembukaan calon caleg, maka kami PBB tidak melakukannya. Sehingga calon kami sudah ada 560 yang daftar dan sedang dalam proses verifikasi, untuk itu kami siap ikut di Pemilu tahun 2014 di urutan nomor 14. Dan ada juga jumlah kader yang lebih di dapil-dapil sendiri.

Bicara tentang kualitas kader, itu tergantung proses pengkaderan di partai itu sendiri. Dan di PBB kami sudah banyak lakukan pengkaderan-pengkaderan di berbagai tahapan itu tadi, Dan diakui memang belum maksimal, tapi untuk kualitas calegnya cukup masalah.

Untuk perekrutan, meskipun PBB ditetapkan belakangan oleh KPU tapi perekrutan caleg PBB bukan setelah penetapan KPU, tapi jauh sebelum itu sudah dilakukan. Dan soal pendaftaran DCS, PBB merencanakan akan melakukannya antara tanggal 18-22 April nanti.

Ada beberapa kendala, misalnya soal calon perempuan. dari 2004 hingga sekarang kita perhatikan. Dari tiap dapil kita sudah posisikan setiap 4 calon ada 1 calon perempuan di nomor urut 1. Dan caleg-caleg perempuan juga sudah dilatih secara khusus, dan walau kualitas mereka tak maksimal namun ada pembekalan-pembekalan yang diberikan ke mereka. Dan dari kuota 30 persen caleg perempuan, itu memang kita akui adalah masalah kuantitas semata dan seharusnya ini adalah prioritas ke kualitas juga.

Penetapan kuota 30 persen untuk caleg perempuan itu seharusnya tak ada, dan pelecehan. Mestinya dihargai dalam bentuk memberikan persaingan murni antar caleg perempuan dan laki-laki. Dan kuota ini masih menjadi syarat dalam aturan KPU dan harusnya ini adalah kebutuhan kita semua. Dan ini menjadi PR semua. Dan bagaimana ini harus jadi kebutuhan, maka semua parpol harus melatih semua caleg perempuannya hingga kehadiran caleg perempuan akan menjadi kebutuhan itu sendiri.

M. Hanif Dhakiri (Sekretaris Fraksi PKB dan Anogta Komisi X DPR RI)

Terkait persepsi public terkait parpol dimana saat ini sangat baik. Ada banyak latar belakang kenapa persepsi ini hadir, salah satunya itu adalah karena bias media. Ada problem lain juga soal komunikasi politik, dan juga karena ada banyak masalah di DPR misalnya kasus korupsi oleh segelintir anggota DPR namun disamaratakan ke semua anggota yang lain.

Padahal, kerja-kerja yang kami lakukan untuk partai politik itu lebih dari persepsi masyarakat terhadap partai politik saat ini. sehingga terlihat bahwa persepsi yang berkembang di masyarakat itu hadir karena mereka tak memposisikan diri ke parpol itu.

Kemudian, soal kaderisasi. Dengan cara yang berbeda semua parpol itu melakukan proses kaderisasi. Di PKB itu ada kaderisasi di strukturnya dan juga di organisasi otonom partai misalnya di PKB itu ada Garda Bangsa. Parpol dengan segala keterbatasan yang mereka miliki mereka lakukan kaderisasi. Soal kualitas itu memang sulit karena banyak faktor yang dipertimbangkan.

Untuk caleg perempuan, kami lakukan kaderisasi sama juga prosesnya dengan caleg laki-laki. Namun, seringkali hanya sedikit calon perempuan yang mau menjadikan politik sebagai karir atau tujuan mereka secara sadar.

Poin dari kaderisasi di PKB ini, meskipun menghadapi segala keterbatasan PKB melakukan kaderisasi cukup intensif. Semua boleh masuk di PKB, dari artis, aktivis dan lain-lainnya tapi mereka harus ikut sistem pengkaderan kami di PKB.

Soal pencalegan, kami sudah setahun yang lalu mulai dan umumkan dan kami parpol pertama yang umumkan pendaftaran caleg, tapi yang daftar memang last minute pada 2013 ini ramenya. Di kami ada peraturan partai soal ini, ada juklak dan juknisnya di partai kami ini. rata-rata parpol punya ini, dan jika ada negosiasi-negosiasi yang muncul sesuai konteksnya itu ia.

Untuk komposisi caleg, karena kami idenitifikasi diri kami sebagai NU maka 70 persen dari dari NU dan 30 persennya dari luar misalnya dari artis, pengusaha dan lain sebagainya. Dari segi mekanisme pencalegan, kami komplit dari pendaftaran, verifikasi, *fit and proper test* dan kami pertanyaan-pertanyaan sangat detail mulai dari sumber daya yang mereka miliki hingga luas jaringan mereka. Para kader PKB juga diminta untuk memiliki kelompok dan basisnya adalah KTA dan ini instrument untuk melihat kinerja caleg ini. ini adalah DCS di tingkat partai.

Pada tahap penilaian ini ada tiga criteria yang kami miliki yaitu integritas, kompetensi dan elektabilitasnya.

Kemudian terkait kuota 30 persen perempuan memang ada dilemma di partai, kami lakukan kaderisasi untuk perempuan juga, tapi hasilnya ya perlu dilihat. Apalagi dilihat di tingkat kabupaten/kota itu susah sekali mencari perempuan yang mau jadi caleg. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi adalah ada persepsi dari perempuan bahwa menjadi caleg itu adalah biaya tinggi. Namun di PKB ada prioritas bagi kader-kader yang bagus termasuk perempuan namun kapasitas parpol sangat terbatas. Dan kita memang perlu terus meyakinkan para perempuan, khususnya aktivis-aktivis perempuan untuk mau menjadi caleg.

Hadar N. Gumay (Wakil Ketua KPU RI)

Terkait persiapan KPU menjalankan pencalonan ini, mulai dari pendaftaran, verifikasi dan nanti kami akan tetapkan, kami rasa kami siap. Ada Parpol yang merasa waktunya tidak cukup itu memang ada. Dan pada saat sosialisasi peraturan-peraturan KPU ini diminta, tapi tak bisa kami akomodir, dank arena kami ada batasan waktu dan ada proses lanjutnya yang tidak bisa ditunda.

Secara spesifik ada dua partai yang belakangan ditetapkan meminta ini, tapi kami sudah balas dan tidak bisa. Waktu kami menetapkan waktu ini kami tidak untuk kepentingan partai tertentu.

KPU dapat banyak masukan, secara formal dari Komisi II untuk pendaftaran pencalonan ini sekurang-kurangnya sudah 4 kali pertemuan dan ditanya tindak lanjutnya. Ada keinginan tertentu dan pada pertemuan terakhir Komisi II minta peraturan diubah, misalnya soal kuota 30 % perempuan dan hal lainnya juga. Terkait ini kami mempertimbangkan dengan hati-hati dan ada yang kami ubah namun ada yang memang tidak bisa kami ubah. Misalnya soal keterwakilan perempuan, menurut kami memang seperti itulah yang diharapkan di UU kita dan kami rasa itu sudah konsisten dengan yang diharapkan di UU tentang ini.

Sampai hari ini, hari ketiga pendaftaran di tingkat pusat belum ada parpol yang datang untuk mendaftar dan kami sudah berinisiatif untuk mengontaknya. Kami harapkan pada proses pendaftaran ini selengkapnyanya. Tahapannya, setelah tanggal 22 ditutup pendaftaran ini, kami ada 14 hari untuk verifikasi. Perubahan DCS hanya bisa jika faktor meninggal dunia, atau usulan masyarakat dan tidak akan diakomodir jika ada yang mengundurkan diri.

SESI TANYA JAWAB

Ahmad (KOPEL), pengalaman kami dari periode 200-2014, kami lihat anggota dewan itu bukan wakil rakyat tapi dia adalah wakil parpol, dan ini tantangan untuk melanjutkan proses demokrasi kita ke depan. Dan itu adalah tantangan terbesarnya.

Totok (PBHI). Proses pengkaderan ini nanti mau dilihat seperti apa ? Apakah yang penting lolos kemudian diam di dewan dan sebagainya ? Pada proses verifikasi KPU apa saja ukuran-ukuran yang diberikan bisa memastikan sistem pengkaderan sudah bagus juga ?

Darmawan (GAPRI), setelah ada pengumuman DCS KPU beri kesempatan untuk masyarakat untuk melihat para caleg ini. dan apakah KPU punya sistem parallel untuk proses ini

TANGGAPAN

Hanif Dhakiri. Anggota dewan kita sekarang memang satu sisi adalah wakil rakyat sekaligus wakil parpol dan keduanya ini harus dipertimbangkan. Dan yang pentingnya bagaimana anggota dewan bisa melihat posisinya sebagai wakil rakyat dan wakil partai ini. wakil partai karena proses nominasinya dari parpol, dan sistem pemilihan itu mereka adalah dipilih langsung oleh rakyat.

Bolehkah, jika hanya mementingkan rakyat? Boleh. Perlu dipahami bahwa parpol itu adalah sebuah organisasi yang memiliki berbagai macam peraturan yang juga harus dihadapi.

Ada persepsi di masyarakat bahwa politisi atau di parpol tidak boleh ada kepentingan. Tapi jangan selalu dipersepsikan tunggal negative, dan sehingga parpol tidak bisa "bernafas lagi" dalam menghadapi masyarakat.

Proses pengkaderan itu juga untuk menjegah agar tidak ada calon instan. Kami berikan pembekalan khusus, itu buat yang bukan kader dan juga mereka juga ikut pembekalan dengan kader yang lain. Kemudian mereka ada penugasan-penugasan kepartaian yang diluar tugas kampanye mereka.

Yasin Ardhy. Idealnya memang adalah ketika kita wakil dewan itu adalah wakil rakyat. Namun ketika kita lihat lagi, rakyat yang mana ini ? maka ini tentunya pertama adalah para konstituen kami terlebih dahulu. Jika kita lihat DPD, idealnya itu harusnya seperti caleg DPR dan aturan-aturan tentang pencalegan di DPR itu juga ada di DPD. Misalnya terkait komposisi calon perempuan, sehingga bukan hanya ada kuota di DPR tapi juga di DPD. Sehingga jika ini bisa dilakukan, maka apa yang diinginkan rakyat bisa terlaksana.

Kemudian terkait kader partai yang dijadikan caleg, prioritas kami untuk caleg adalah fungsionaris, yaitu yang sudah ikut pelatihan di tingkat 1-3. Ini yang dijadikan prioritas. Jika ada caleg instan, yang diberikan pertama di berikan buku, diajak diskusi jika setuju baru mereka ditetapkan, jika tidak mereka tak ditetapkan. Baru kemudian dilakukan berbagai pelatihan.

Hadar N Gumay, apakah bisa didetek kalau partai lolos verifikasi itu bisa dibilang kadernya bagus? Saya rasa tidak kalau itu terkait pencalegan karena proses verifikasi itu hanya pengurus di tingkat nasional hingga sampai daerah. Jadi lebih ke kepengurusan. Dan di tingkat kecamatan juga yang dilihat administrasi saja, dan juga dilihat keanggotaanya yang melalui proses sample-nya.

Tapi kalau kita kembali lihat media statemen parpol, itu rame bilang mereka siap ikut pemilu, tapi harusnya mereka siap juga untuk pengkaderan ini.

Apakah KPU ikut memastikan kualitas dari caleg-caleg ini? ada tapi sangat minim. KPU tidak bisa ukur caleg di luar syarat yang ada, misalnya batas minimal pendidikan adalah SLTA dan memang terbatas di dokumen-dokumen dan masukan masyarakat itu yang bisa kami follow up.

Setelah DCS, itu kami akan pasang yang lolos di web dan ada soal CV juga dan akan kami tanyakan terlebih dahulu apakah bersedia atau tidak. Ini hanya agar masyarakat tahu lebih jauh tentang caleg ini.

Dalam masa DCS diumumkan tanggal 13-17 juni nanti dan setelah itu masukan masyarakat diterima. Masukan yang akan tidak kami tindak lanjuti diluar syarat formal yang KPU tetapkan misalnya berapa kali caleg ini kawin siri, atau dia bukan loyal dan sebagainya.

Kemudian terkait track record, misalnya pernah dipenjara lebih dari 5 tahun mereka harus buat berbagai dokumen terkait ini dan kami akan mengecek ini dan akan informasikan ke parpol yang bersangkutan dan parpol juga memberikan lagi jawaban ke kami. Jika ada masalah misalnya ada dokumen palsu, atau data bohong dan di pengadilan terbukti maka di DCS itu mereka dicoret dan tidak bisa digantikan.

Didik Supriyanto, sikap kontra terhadap parpol itu kontra produktif. Sikap kritis terhadap parpol itu penting. Maka sinisme yang berlebihan itu tidak tepat. Kemudian hubungan partai dengan legislative itu tergantung sistem yang kita anut. Di DPR kita memang belum clear, karena praktek politik kita yang baru 15 tahun belum clear.

Kemudian soal kepentingan pribadi, di sistem kita tidak bisa mendeteksi ini lebih baik apalagi terkait kultur politik kita yang dianut dari dulu. Ada persaingan-persaingan internal yang merupakan persaingan hidup mati. Ini terkait sistem oligarki yang masih kita anut. Prakteknya adalah meskipun sudah melewati sistem pendaftaran yang bertahap dan terbuka, tapi caleg yang akan diterima KPU adalah yang ditanda tangani oleh Ketua partai dan Sekjen.

Kemudian persepsi bahwa parpol tak akomodasi masalah rakyat itu adalah karena ketemu hanya lima tahun sekali. Bisa saja itu 2,5 tahun sekali, misalnya ada dua kali pemilu untuk pemilu daerah dan pemilu nasional.

SESI TANYA JAWAB 2

Anto, The Indonesian Institute, Bagaimana cara parpol meminimalisir terjadinya money politik ?

Deri, Media Indonesia. Pendaftaran itu sudah mulai, tapi antara KPU dan Komisi 2 masih memperdebatkan soal kuota dan berbagai syarat yang ada di PKPU, sampai kapan ini akan terus berlanjut?

Adinda, The Indonesian Institute. Ke mas Hadar. KPU sudah berkonsultasi dengan DPR beberapa kali dan juga terhadap peraturan-peraturan yang ada. Pertanyaannya, sebenarnya apa poin yang menjadi keberatan dari DPR ini ? Apakah beda interpretasi dari berbagai pihak ini akan berpengaruh.

Tanggapan:

Hadar N Gumay, KPU bekerja berdasarkan peraturan yang telah kami buat dan dalam buat peraturan ini kami memang harus berkonsultasi dengan berbagai pihak agar peraturan yang keluar tidak nyelonong. Memang ada yang *miss*, karena dewan sedang reses misalnya ada yang model lewat kontak telepon lalu pertemuan belakangan dan ada yang tidak kami lakukan karena ada peraturan yang sifatnya perubahan.

Sebagian besar itu hampir semuanya kami laksanakan proses konsultasi. Ada proses tanya jawab tapi keputusan ada di tangan kami, kami bekerja mandiri dan tidak ditekan oleh banyak pihak lagi.

Ada juga yang formatnya RDP misalnya untuk pemutusan kuota perempuan, dan kepala desa yang tidak boleh melakukan pencalegan. Dari RDP ini bisa kami terima atau tidak. Dan jika anggota dewan tidak setuju bisa bawa ke DKPP. Dan kami juga bisa bawa ke MA dan sebagainya.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*